

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019)

Septiana Hutami¹, Suyatmin Waskito Adi²

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta; septianahutami1999@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Surakarta; suy182@ums.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Januari, 2023

Revised Januari, 2023

Accepted Januari, 2023

Kata Kunci:

Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Leverage

Keywords:

Tax Avoidance, Institutional Ownership, Independent Commissioners, Audit Committees, Audit Quality, Managerial Ownership, Firm Size, and Leverage

ABSTRAK

Tax avoidance adalah upaya dalam perpajakan yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan beberapa celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 188 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh 564 perusahaan sebagai sampel penelitian selama tiga tahun pengamatan (2017-2019). Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

ABSTRACT

Tax Avoidance is an effort in taxation that is carried out legally by exploiting some of the loopholes contained in existing tax regulations to avoid paying taxes or conducting transactions that have no purpose other than to avoid taxes. This study aims to analyze whether there is an influence of corporate governance, company size, and leverage on tax avoidance in manufacturing companies on the IDX for the 2017-2019 period. The population in this study amounted to 188 companies. The sampling technique used was a purposive sampling method and 564 companies were obtained as research samples during three years of observation (2017-2019). Multiple linear regression analysis was used as data analysis. The results of this study indicate that institutional ownership and leverage affect tax avoidance. Independent commissioners, audit committees, audit quality, managerial ownership, and firm size have no effect on tax avoidance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Septiana Hutami Puspita Sari

Institution: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: septianahutami1999@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pemerintah di Indonesia memerlukan daya yang besar dalam melakukan pembangunan di dalam negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat suatu regulasi yang mengatur perpajakan di negara Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima oleh suatu negara. Pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Tax Avoidance merupakan upaya dalam perpajakan yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan beberapa celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Praktek penghindaran pajak di dalam perusahaan dipengaruhi oleh faktor corporate governance. Ada beberapa hasil penelitian tentang pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance. Hasil Empiris (Winata, 2014) membuktikan bahwa corporate governance yang dikendalikan dengan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berbeda dengan (Khoirunnisa, 2016) dibuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Tetapi hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sheldira dan Niki, 2015) yang membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil Empiris tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Khoirunnisa, 2016), dan (Winata, 2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Komite audit yang digunakan dalam penelitian (Agung, et al, 2016) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan (I Gusti dan Ketut, 2014), Silvia dan Puji (2014) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik mengangkat kembali topik mengenai tax avoidance dengan menggunakan corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh corporate governance yang dikendalikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perusahaan yang nantinya dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

a. Teori Keagenan

Teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan (Supriyono, 2018). Agency Theory menjelaskan adanya konflik antara manajer selaku agen dengan pemilik selaku

principal. Teori keagenan menggambarkan kontrak antara prinsipal (pemilik modal) dengan agent (pengelola dana). Pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada *agent* yang diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi *principal*, dimana *principal* memerintah *agent* untuk membuat keputusan terbaik untuk *principal*. Penyebab konflik antara manajer dengan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Hal ini memacu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya.

b. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (compliance theory) adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Maka dapat diartikan kepatuhan perpajakan adalah kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajibannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komparatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. (Khurana, 2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan.

d. Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktek *tax avoidance* (Harto & Puspita, 2014). Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen dan Meckling, 1976). Proporsi komisaris independen

yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan.

e. Komite Audit

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010). Pada prinsipnya, tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2014). Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance*(CG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum dan Zulaikha, 2013). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*.

f. Kualitas Audit

Kualitas audit dapat diartikan sebagai kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang berkualitas diperoleh apabila telah memenuhi ketentuan dan standar pengauditan yang dilakukan oleh auditor. Kualitas audit adalah kebebasan yang tinggi sebagai faktor kemungkinan auditor dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Penemuan pelanggaran merupakan ukuran kualitas audit yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan auditor tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Wayan & Anggreni, 2017) kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Dapat disimpulkan kualitas audit adalah segala kemungkinan yang terjadi saat auditor melakukan audit atas laporan keuangan klien dapat menemukan adanya pelanggaran dalam sistem pencatatan akuntansi klien dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana laporan tersebut harus berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang berlaku.

g. Ukuran Perusahaan

(Agustina & Aris, 2016) ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan cara membandingkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar total aset perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Dengan besarnya beban pajak yang harus perusahaan bayar

memungkinkan mereka untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sementara di lain pihak, negara membutuhkan penerimaan dari sektor pajak semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan (Dewinta & Setiawan, 2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

h. Leverage

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. (Irfan Fahmi, 2012) rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Financial leverage diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yaitu, data dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan serta menggunakan model matematis, teori serta hipotesis yang di kaitkan dan mempunyai kejelasan unsur. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang sudah dipublikasikan berupa laporan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 yang meliputi laporan keuangan yang diperlukan oleh peneliti.

3.2 Definisi Operasional Variabel

a. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan peraturan perpajakan sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Mukhsin, 2018). Untuk mengukur perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Di mana semakin tinggi nilai Cash ETR maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah (Andrean, 2018). Perhitungan dijabarkan sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusional pada akhir tahun. Pemilik institusi yang dimaksud adalah pihak luar yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan tersebut biasanya dimiliki oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, lembaga asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Indriawati, 2017). Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase perbandingan antara

kepemilikan saham oleh institusional dari seluruh jumlah saham yang beredar (Charisma, 2019). Perhitungan sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

c. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi untuk bertindak independen (Ghozali, 2012). Berdasarkan peraturan BEI nomor kep- 205/BEJ/07-2004 setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman corporate governance (Eksandy, 2017). Berdasarkan penelitian Sandy (2015) komisaris independen diukur dengan persentase keberadaan komisaris independen dalam perusahaan. Dirumuskan sebagai berikut:

$$KInd = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

d. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen dalam tugasnya membantu dewan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan atas proses laporan keuangan agar disajikan secara wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial dari seluruh jumlah saham yang beredar. Berdasarkan peraturan BAPEPAM dan kementerian BUMN, bahwa komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan (Djefris, 2018). Perhitungan sebagai berikut:

$$KA = \sum \text{Komite Audit}$$

e. Kualitas Audit

Kualitas audit seperti yang dikatakan oleh De Angelo (1981) adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan audit (Setyawan, 2018). Zurianti dan Apriliani (2018) mengungkapkan, audit yang berkualitas adalah audit yang berkompeten dan independen. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan dalam mengaudit perusahaan. KAP besar yang sering disebut KAP the big four dipertimbangkan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibanding dengan KAP non the big four (Mahaputra, 2016). Dalam penelitian ini kualitas audit menurut Mahaputra (2016) diukur dengan menggunakan variabel dummy, jika perusahaan diaudit oleh KAP the big four akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat KAP the big four akan diberi nilai 0.

f. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proposi saham yang dimiliki pihak manajemen. Saham ini umumnya dimiliki oleh komisaris, direksi, sekretaris perusahaan, atau karyawan dari perusahaan

sendiri Sihaloho dan Pratomo, 2015). Menurut Prasetyo dan Pramuka (2018) variabel kepemilikan manajerial diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial dari seluruh jumlah saham yang beredar. Perhitungan dijabarkan sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham dimiliki Manajerial}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

g. Ukuran Perusahaan

(Agustinus & Aris, 2016) ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan cara membandingkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar total aset perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Dengan besarnya beban pajak yang harus perusahaan bayar memungkinkan mereka untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sementara di lain pihak, negara membutuhkan penerimaan dari sektor pajak semaksimal mungkin. Perhitungan dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

h. Leverage

Leverage merupakan besarnya penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Leverage dalam penelitian ini menggunakan rasio DER (Debt to Equity Ratio), karena rasio ini mengukur proposi dana yang bersumber dari utang untuk penggunaan aktiva perusahaan. *Debt to Equity Ratio* dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian

Jenis data penelitian ialah data sekunder. Populasi nya ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2019. data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang sudah dipublikasikan berupa laporan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 yang meliputi laporan keuangan yang diperlukan oleh peneliti. Dengan teknik purposive sampling, didapat jumlah perusahaan memenuhi kriteria sebanyak 120 perusahaan selama 2017-2019. Berikut merupakan ringkasan kriteria pemilihan sampel yang bisa dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 1. Data Sampel penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa	188
2	Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019	35
	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan	

3	Laporan Keuangan secara berturut-turut selama periode 2017-2019 Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.	47
4	Perusahaan manufaktur mengalami kerugian selama periode 2017-2019	34
5	Perusahaan manufaktur yang menggunakan satuan mata uang selain rupiah.	29
6	Jumlah sampel perusahaan	43
7	Jumlah sampel perusahaan 2017-2019 (3 tahun)	129
8	Jumlah data outlier	(9)
9	Jumlah sampel bersih tahun perusahaan	120

Sumber BEI, data diolah

4.2 Hasil Uji Analisis Data Penelitian

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	,0900	,4079	,2458	,03971	120
Residual	-,23575	,544568	,00000	,10255	120
Std. Predicted Value	-3,922	4,082	,000	1,000	120
Std. Residual	-2,230	5,162	,000	,970	120

Sumber: Output SPSS Yang Diolah

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan *leverage* mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilaksanakan sebagai syarat uji hipotesis. Dilakukan dengan:

1) Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
N	120
Normal Parameters ^{a,b} Mean	,0000000
Std. Deviation	,10255027
te Positive Negative	,157
Kolmogorov-Smirnov Z	,157
Asymp. Sig. (2-tailed)	-,130
	,157
	,000

Sumber: Output SPSS Yang Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas dapat dilihat bahwa $N = 120 > 30$. Hal ini menunjukkan bahwa data yang banyaknya lebih dari 30 dapat dikatakan berdistribusi normal dan dapat disebut sebagai sampel besar.

2) Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
KINS	,682	1,466
KIND	,726	1,378
KA	,908	1,101
KUA	,708	1,412
KM	,951	1,052
UP	,667	1,500
LEV	,869	1,151

Sumber: Output SPSS Yang Diolah

Hasil uji multikolinieritas pada di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel dari independen memiliki Tolerance Value (TV) dan Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan linier diantara variabel-variabel independen dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3) Hasil Uji Autokorelasi

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,00009
Cases < Test Value Cases >= Test	60
Value Total Cases	60
Number of Runs	120
Z	71
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,833
	,067

Sumber: Output SPSS yang Diolah

Berdasarkan hasil uji autokorelasi didapatkan besarnya nilai *Run Test* adalah 0,067. Hal tersebut menunjukkan nilai *Run Test* lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dipakai pada penelitian ini tidak terdapat auto korelasi.

4) Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	P-Value	Kesimpulan
KINS	0,292	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
KIND	0,996	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
KA	0,989	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
KUA	0,248	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
KM	0,730	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
UP	0,932	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
LEV	0,256	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: hasil SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel IV.6 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel independen menunjukkan nilai $p > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas.

4.3 Uji Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,159	,215		,738	,462
	KINS	-,227	,077	-,313	-2,936	,004
	KIND	,044	,057	,080	,771	,442
	KA	,068	,111	,056	,607	,545
	KUA	-,046	,027	-,176	-1,679	,096
	KM	-,039	,056	-,062	-,689	,492
	UP	,007	,006	,120	1,108	,270
	LEV	-,040	,018	-,208	-2,197	,030

Sumber: hasil SPSS yang Diolah

Hasil pada tabel diatas menunjukkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$TA = 0,159 - 0,227 KINS + 0,044 KIND + 0,068 KA - 0,046 KUA - 0,039 KM + 0,007 UP - 0,040 LE +$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 0,159. Hal tersebut berarti bahwa jika variabel independen bernilai nol, maka variabel *tax avoidance* sebesar 0,159.
- b. Nilai koefisien variabel Kepemilikan Institusional adalah sebesar -0,227. Hal ini berarti apabila Kepemilikan Institusional semakin kecil, maka akan menurunkan *tax avoidance*. Sebaliknya, apabila Kepemilikan Institusional semakin besar maka *tax avoidance* akan meningkat.

- c. Nilai koefisien variabel Komisaris Independen adalah sebesar +0,044. Hal ini berarti apabila Komisaris Independen semakin besar, maka akan menaikkan *tax avoidance*. Sebaliknya, apabila Komisaris Independen semakin kecil maka *tax avoidance* akan turun.
- d. Nilai koefisien variabel Komite Audit adalah sebesar +0.068. Hal ini berarti apabila Komite Audit semakin besar, maka akan menaikkan *tax avoidance*. Sebaliknya, apabila Komite Audit semakin kecil maka *tax avoidance* akan turun.
- e. Nilai koefisien variabel Kualitas Audit adalah sebesar -0.046. Hal ini berarti apabila Kualitas Audit semakin kecil, maka akan menurunkan *tax avoidance*. Sebaliknya, apabila Kualitas Audit semakin besar maka *tax avoidance* akan meningkat.
- f. Nilai koefisien variabel Kepemilikan Manajerial adalah sebesar -0.039. Hal ini berarti apabila Kepemilikan Manajerial semakin kecil, maka akan menurunkan *tax avoidance*. Sebaliknya, apabila Kepemilikan Manajerial semakin besar maka *tax avoidance* akan meningkat.
- g. Nilai koefisien variabel Ukuran Perusahaan adalah sebesar +0.007. Hal ini berarti apabila Ukuran Perusahaan semakin besar, maka akan menaikkan *tax avoidance*. Sebaliknya, apabila Ukuran Perusahaan semakin kecil maka *tax avoidance* akan turun.
- h. Nilai koefisien variabel *Leverage* adalah sebesar -0.040. Hal ini berarti apabila *Leverage* semakin kecil, maka akan menurunkan *tax avoidance*. Sebaliknya, apabila *Leverage* semakin besar maka *tax avoidance* akan meningkat.

4.4 Uji Ketepatan Model

a. Uji F

Tabel Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,188	7	,027	2,399	,025 ^b
	Residual	1,251	112	,011		
	Total	1,439	119			

Sumber: hasil olah data, 2022

Tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,025 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*, sehingga model regresi dalam kondisi *goodness of fit*.

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,361 ^a	,130	,076	,10571

Sumber: hasil SPSS yang Diolah

Tabel diatas menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0,076 yang berarti sebesar 7,60% nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel- variabel independen yang digunakan, yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan

manajerial, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Sedangkan sebesar 92,40% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.5 Uji Hipotesis

Uji T

Tabel Hasil Uji Koefisien T

Variabel	Thitung	Sign	Kesimpulan
KINS	-2,936	,004	Signifikansi
KIND	,771	,442	Tidak Signifikansi
KA	,607	,545	Tidak Signifikansi
KUA	-1,679	,096	Tidak Signifikansi
KM	-,689	,492	Tidak Signifikansi
UP	1,108	,270	Tidak Signifikansi
LEV	-2,197	,030	Signifikansi

Sumber: hasil olah data, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik t di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Variabel Kepemilikan Institusional mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi Kepemilikan Institusional tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa ada pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*. Oleh karena hasil tersebut memenuhi kriteria pengujian, maka H1 diterima.
- b. Variabel Komisaris Independen mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,442. Nilai signifikansi Komisaris Independen tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena hasil tersebut tidak memenuhi kriteria pengujian, maka H2 ditolak.
- c. Variabel Komite Audit mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,545. Nilai signifikansi Komite Audit tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena hasil tersebut tidak memenuhi kriteria pengujian, maka H3 ditolak.
- d. Variabel Kualitas Audit mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,096. Nilai signifikansi Kualitas Audit tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Kualitas Audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena hasil tersebut tidak memenuhi kriteria pengujian, maka H4 ditolak.
- e. Variabel Kepemilikan Manajerial mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,492. Nilai signifikansi Kepemilikan Manajerial tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena hasil tersebut tidak memenuhi kriteria pengujian, maka H5 ditolak.
- f. Variabel Ukuran Perusahaan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,270. Nilai signifikansi Ukuran Perusahaan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena hasil tersebut tidak memenuhi kriteria pengujian, maka H6 ditolak.

- g. Variabel *Leverage* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,030. Nilai signifikansi *Leverage* tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa ada pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*. Oleh karena hasil tersebut memenuhi kriteria pengujian, maka H7 diterima.

4.6 Pembahasan

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* adalah signifikan, atau dengan kata lain variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar di perusahaan menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan (Arianandini dan Ramantha, 2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan (Rizal dan Putra, 2017) penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.

b. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* adalah tidak signifikan, atau dengan kata lain variabel Pengaruh Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena pembentukan komisaris independen belum memperhatikan kompleksitas perusahaan sehingga hal tersebut dapat membuat kinerja dari komisaris independen kurang efektif dalam melakukan pengawasan mengenai kebijakan perusahaan sehingga komisaris independen tidak dapat menghalangi tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan.

Sejalan dengan penelitian (Lutfia & Pratomo, 2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan Putra dan Merkusiwati (2016) penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara komisaris independen dengan *tax avoidance*.

c. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* adalah tidak signifikan, atau dengan kata lain variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara agresif bukan dari jumlah komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, pada kenyataannya jumlah komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan penelitian N. M. Dewi (2019) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan Cahyono dkk (2016) penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara komite audit dengan *tax avoidance*.

d. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* adalah tidak signifikan, atau dengan kata lain variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan ketika KAP mengaudit laporan keuangan memiliki pedoman pada

standar pengendalian mutu kualitas audit dan aturan etika akuntan publik yang sama sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada. Sejalan dengan penelitian (Arinda dan Dwimulyani, 2019) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan (Feranika, 2017) penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas audit dengan *tax avoidance*.

e. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* adalah tidak signifikan, atau dengan kata lain variabel pengaruh kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. pemegang saham manajerial yang semakin meningkat akan meningkatkan pengawasan mengenai keputusan - keputusan pihak manajer termasuk keputusan tentang *tax avoidance*. peningkatan pengawasan ini berdampak pada perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, karena pihak manajer memiliki peran ganda bukan hanya sebagai *agent* tetapi juga sebagai *principal*. Sejalan dengan penelitian (Zahirah, 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan (Putri dan Lawita, 2019) penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance*.

f. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah tidak signifikan, atau dengan kata lain variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar proporsi pada nilai ukuran perusahaan tidak akan mempengaruhi peningkatan dalam praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. besarnya total *assets* yang dimiliki maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut namun dalam melaporkannya akan lebih akurat. Hal tersebut akan lebih memungkinkan perusahaan sulit untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Sejalan dengan penelitian (Nugraheni dan Pratomo, 2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan (Praditasari dan Setiawan, 2017) penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*.

g. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* adalah signifikan, atau dengan kata lain variabel *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memilih menggunakan kebijakan *leverage* akan mendapatkan insentif pajak yang memanfaatkan beban bunga untuk memperkecil beban pajaknya. Hal ini berarti perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* sebagai akibat dari insentif pajak atas beban bunga yang diterima perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Sejalan dengan penelitian (Oktamawati, 2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan (Dewi dan Noviyari, 2017) penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *leverage* dengan *tax avoidance*.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan dan analisis data maka diperoleh hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan Institusional berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap tax avoidance
- b. Komisaris Independen tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap nilai perusahaan.
- c. Komite Audit tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap nilai perusahaan.
- d. Kualitas Audit tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap nilai perusahaan.
- e. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap nilai perusahaan.
- f. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap nilai perusahaan.
- g. Leverage berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap tax avoidance.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan manufaktur saja sehingga hasil penelitian ini tidak akan sama jika diimplementasikan dengan sektor perusahaan lain.
- b. Periode penelitian ini relatif singkat hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2017-2019.
- c. Penelitian ini terbatas pada variabel yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan leverage sehingga faktor-faktor lain yang secara teoritis diduga dapat mempengaruhi nilai perusahaan tidak diteliti dalam penelitian ini.
- d. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia yang berada pada sektor non finansial pada periode 2018 – 2020. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada sector perusahaan yang lain yang terdaftar di BEI untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana pengaruh dari variabel bebas pada variabel terikat ajak.

3.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran bagi peneliti selanjutnya guna meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah sektor perusahaan yang terdaftar di BEI.
- b. Penelitian ini menggunakan periode penelitian yang relatif pendek, yaitu dari tahun 2017-2019. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode penelitian.
- c. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang diduga mempengaruhi variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088–2116.
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Government Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123–140.
- Cahyono, D. D., Rita, A., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51.
- Feranika, A. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja*, 2(2), 12–21.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding Management*, 5(2), 2386.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding Management*, 5(2), 2227.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(123–40).
- Praditasari, A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1229–1258.
- Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690–714.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Rizal, R. V., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh leverage, profitability, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11.
- Zahirah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Online Mahasiswa Ilmu Ekonomi*, 4(1).